

HUKUM

Eks Ajudan Jokowi
Dituntut 10 Tahun Penjara
Halaman 2

SPORT & SELEB

Marc Marquez Rebut
Pole Position MotoGP Australia 2026
Halaman 8

HARIAN MERDEKA

SABTU, 24 OKTOBER 2026

ASPIRASI RAKYAT

Rp. 15.000 | TERBIT SORE

www.harian-merdeka.com

Kasus Korupsi Dana Sawit Rp176 Triliun Disinggung DPR

JAKARTA | *Harian Merdeka* — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan dana perkebunan yang nilainya mencapai Rp176,1 triliun.

Halaman 7

Rieke Diah Pitaloka





KPK Panggil 5 Bos PT Bela Parahiyangan Terkait Korupsi HGB di ATR/BPN

JAKARTA | **Harian Merdeka**

KPK memanggil jajaran petinggi PT Bela Parahiyangan terkait dugaan kasus suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN di wilayah Bogor. Jajaran petinggi PT Bela Parahiyangan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN di wilayah Bogor," jelas jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Budi belum menjelaskan terkait materi pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel). Berikut para saksi yang diperiksa:

1. Ryan Brasali - Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo
2. ?Yunan Mahastra Satria - Manager Humas PT Bela Parahiyangan Investindo
3. ?Ari Awan Nuryatmi - Manager Legal PT Bela Parahiyangan Investindo
4. ?Evelin Lili - Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo
5. ?Albertus Pratomo - Direktur Utama PT Bela Parahiyangan Investindo

Sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan di Kabupaten Bandung Barat terkait dugaan suap hak guna bangunan pada lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hasilnya, KPK menyita dokumen perpanjangan hak guna bangunan.

"Barang bukti yang diamankan dalam pengeledahan kemarin di antaranya dokumen perpanjangan HGB ke Kementerian ATR/BPN," ungkap jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/9). ● (Egi)

Eks Ajudan Jokowi Dituntut 10 Tahun Penjara



JAKARTA |
Harian Merdeka

Mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Letjen TNI Widi Prasetyono, dituntut 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah negara di Cilacap, Jawa Tengah. Jaksa juga meminta Widi dipecat dari dinas militer serta membayar uang pengganti Rp21,05 miliar. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta pada Kamis (22/10/2026).

Perkara ini berkaitan dengan transaksi lahan perkebunan Caruy seluas 716,2 hektare yang diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp237,09 miliar.

Selain pidana penjara, Widi dituntut membayar denda Rp500 juta. Jaksa juga meminta agar ia diberhentikan dari dinas militer sebagai konsekuensi hukum atas dugaan tin-



dak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena Widi pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat, termasuk Komandan Jenderal Kopassus dan Pangdam IV/Diponegoro.

Uang Rp21,05 Miliar Diduga Mengalir ke Widi Dalam persidangan, jaksa menguraikan dugaan penerimaan dana sebesar Rp21,05 miliar oleh Widi melalui rekening perantara milik dua adik iparnya.

Menurut uraian jaksa, uang tersebut diduga digunakan untuk sejumlah kepentingan pribadi, mulai dari pembelian tanah, pembangunan rumah kos di Semarang, pembelian kendaraan mewah, hingga pembiayaan usaha peternakan ayam.

Jaksa meminta agar uang pengganti tersebut dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, harta benda Widi dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Besarnya uang pengganti yang dituntut menjadi salah satu aspek penting dalam perkara ini.

Namun, jumlah tersebut merupakan tuntutan jaksa dan belum dapat disamakan dengan kewajiban final yang ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Transaksi Lahan 716,2 Hektare Jadi Pokok Perkara

Kasus ini bermula dari transaksi lahan perkebunan Caruy di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, dengan nilai sekitar Rp237,09 miliar kepada PT Cilacap Segara Artha (CSA).

Lahan tersebut disebut merupakan aset negara yang penguasaannya berada di bawah Kodam IV/Diponegoro melalui Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip).

● (Agus)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P. Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Pabrik Sabu 1,2 Ton Terbongkar di Aceh

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pengungkapan pabrik sabu dengan barang bukti mencapai 1,2 ton di Kabupaten Pidie, Aceh, menjadi peringatan serius terhadap ancaman jaringan narkoba internasional di Indonesia. Negara yang selama ini dikenal sebagai pasar peredaran narkoba kini disebut mulai menjadi sasaran produksi narkoba berskala besar.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, terbongkarnya laboratorium gelap atau clandestine laboratory di Aceh menunjukkan adanya perubahan ancaman yang harus diantisipasi secara serius oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pasar, melainkan target produksi jaringan internasional,” kata Suyudi dalam konferensi pers di lokasi pabrik di Kabupaten Pidie, Ju-

mat (23/10/2026).

Pabrik tersebut dibongkar melalui operasi gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Bea Cukai pada Kamis (22/10/2026). Lokasinya berada di sebuah rumah toko (ruko) di Gampong Beureueh Dua, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu berbentuk cair dan kristal dengan total yang dilaporkan mencapai 1,2 ton. Aparat juga menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi narkoba serta menangkap 11 orang yang diduga terlibat, termasuk dua warga negara asing asal Tiongkok.

Pengungkapan ini bukan sekadar keberhasilan mengagalkan peredaran narkoba dalam jumlah besar.

Keberadaan fasilitas produksi di tengah kawasan permukiman juga memunculkan pertanyaan



mengenai bagaimana jaringan tersebut dapat beroperasi dan menyiapkan sarana produksi tanpa lebih dahulu terdeteksi.

Kapolri Minta Pengawasan Diperketat

Suyudi menegaskan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan operasi kepolisian. Pengawasan lingkungan dan partisipasi ma-

syarakat dinilai penting untuk mencegah rumah, ruko, maupun bangunan lain disalahgunakan sebagai tempat produksi narkoba.

Ia secara khusus mengingatkan pemilik rumah kontrakan dan ruko yang disewakan agar memeriksa identitas serta latar belakang calon penyewa.

● (Agus)

Kasus Pesawat Kargo Fiktif, Eks Dirut Angkasa Pura Kargo Jadi Tersangka

TANGERANG |
Harian Merdeka

Rencana bisnis penyewaan pesawat kargo yang tak pernah terealisasi berujung perkara korupsi. Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo (APK), Gautsil Madani (GM), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat kargo fiktif tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp4,9 miliar.

Dalam perkara ini, pesawat Boeing 737-300 yang direncanakan didatangkan dari Dubai tak kunjung tiba di Indonesia. Namun, pembayaran kepada mitra usaha tetap berjalan. Akibatnya, rencana pengoperasian layanan angkutan kargo yang telah dimasukkan ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tidak terlaksana.

Penetapan Gautsil menambah daftar pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan dalam kerja sama bisnis tersebut. Kejaksaan Negeri



(Kejari) Kota Tangerang sebelumnya telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dan menahan keduanya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Tangerang, Januar Dwi Nugroho, membenarkan penetapan mantan Dirut PT APK tersebut. Ia menyebut perkara itu berkaitan dengan kegiatan perusahaan pada 2022, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp4,9 miliar.

“Pelaku merupakan eks (Dirut PT APK) karena ini terjadi tahun

2022. Kerugian negara mencapai Rp4,9 miliar,” kata Januar, Jumat (23/10/2026).

Pesawat Tak Tiba, Pembayaran Tetap Berjalan

Kasus ini bermula pada 2021, ketika PT Angkasa Pura Kargo menetapkan layanan penyewaan pesawat sebagai lini bisnis baru. Rencana itu kemudian dimasukkan ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2022.

Untuk merealisasikan bisnis tersebut, PT APK menunjuk perusahaan swasta berinisial PT WSU sebagai mitra usaha. Kerja sama itu berkaitan dengan rencana pengoperasian pesawat Boeing 737-300 yang disebut akan didatangkan dari Dubai untuk mendukung kegiatan angkutan barang.

Namun, pelaksanaan kerja sama tidak berjalan sesuai rencana. Pesawat yang menjadi dasar pengoperasian bisnis tersebut tidak pernah tiba di Indonesia, sementara pembayaran kepada mitra usaha tetap dilakukan.

Januar menjelaskan, PT WSU

memiliki kewajiban mendatangkan pesawat untuk digunakan dalam bisnis kargo. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak terlaksana hingga perkara ini diusut.

“PT WSU ini wajib mendatangkan pesawat yang nanti dipakai untuk bisnis usaha kargo, ternyata sampai dengan saat ini, pesawat itu tidak tiba di Indonesia. Jadi sama sekali tidak dapat menjalankan bisnis itu,” ujarnya.

Selain persoalan gagalnya kedatangan pesawat, perusahaan mitra tersebut disebut tidak memiliki sertifikasi untuk mengoperasikan pesawat yang direncanakan. Kondisi itu menjadi bagian dari persoalan dalam pelaksanaan kerja sama penyewaan pesawat kargo tersebut.

Tiga Tersangka, Kerugian Negara Rp4,9 Miliar

Pengusutan perkara ini kemudian berkembang hingga menyeret Gautsil Madani, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT APK ketika kegiatan tersebut berlangsung. ● (Egi)

Buntut Penunjukan Anak Jabat Tenaga Ahli, Menteri Haji Gus Irfan Panen Kritik

JAKARTA |
Harian Merdeka

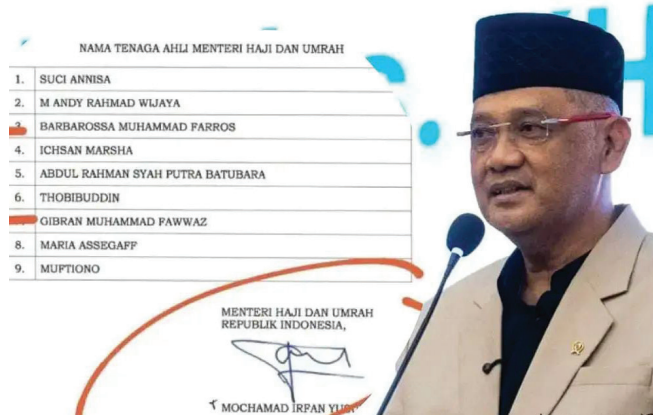
Netizen murka Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf diduga angkat dua anak kandungnya sebagai tenaga ahli kementerannya sendiri. Sorotan tajam ini mencuat seiring bergulirnya tuduhan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dinilai kembali subur di birokrasi pemerintahan.

Dugaan nepotisme ini menyeruak ke publik usai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 beredar luas di jagat maya. Dalam berkas penetapan sembilan nama penasihat tersebut, terselip nama Barbarossa Muhammad Farros serta Gibran Muhammad Fawwaz yang merupakan putra sang menteri.

Langkah kontroversial ini langsung menuai kritik keras lantaran berpotensi memicu benturan kepentingan serta mengabaikan asas transparansi jabatan publik. Publik mempertanyakan kualifikasi mendasar serta standar seleksi yang dipakai hingga kedua anak pejabat tersebut bisa mengamankan posisi strategis.

"Dua anak Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, tercantum dalam daftar tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Pengangkatan ini memunculkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan dan transparansi dalam pengisian jabatan publik," tulis akun itu.

Reaksi keras salah satunya datang dari pengamat politik Saiful Mujani yang secara terbuka menyindir kepaasan atas etika birokrasi saat ini.



"Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri haji dunia udah dekat kiamat," tulis Saiful Mujani di media sosialnya.

Warganet meluapkan kekecewaan mendalam karena menganggap tindakan tersebut mencoreng semangat perbaikan birokrasi yang diperjuangkan sejak lama.

Banyak pihak menilai kemudahan akses posisi penting bagi anak pejabat sangat melukai perasaan masyarakat umum yang kesulitan mendapat pekerjaan.

"Susah-susah rakyat berjuang berantas KKN di era reformasi, eh dibangkitkan kembali," ungkap warganet, dikutip dari AyoBandung.

"Ada orang dalam, miris sekali banyak orang mencari pekerjaan ternyata negeri ini sarat dengan KKN," ungkap warganet.

Keberadaan jalur khusus bagi lingkaran dalam pejabat publik ini dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang makin vulgar.

"Enak ya gak usah cari-cari kerja kaya kita," kata warganet lainnya.

Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan resmi mengemban am-

anat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak 8 September 2025.

Sosok kelahiran Jombang pada 24 Juni 1962 ini merupakan kementerian baru yang memisahkan diri dari struktur Badan Penyelenggara Haji yang sempat dipimpinnya sejak Oktober 2024.

Gus Irfan sendiri mengantongi rekam jejak akademis hingga tingkat doktor di bidang Manajemen Pendidikan Islam yang diselesaikannya pada Februari 2025 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selain berbekal latar pendidikan tinggi dari Universitas Brawijaya, ia juga tumbuh dari trah keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng.

Ia adalah putra dari tokoh NU KH Muhammad Yusuf Hasyim sekaligus cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari.

Namun, besarnya nama besar keluarga dan latar akademik tersebut kini berhadapan langsung dengan tuntutan akuntabilitas publik atas tata kelola kementerian yang dipimpinnya.



Kemendagri Dorong Penguatan Peran Karang Taruna

YOGYAKARTA | Harian Merdeka

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat peran Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan generasi muda sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan nasional. Di tengah besarnya proporsi penduduk usia produktif di Indonesia, Karang Taruna dinilai memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi pemuda. Karena itu, pemberdayaan generasi muda perlu menjadi perhatian pemerintah di seluruh tingkatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Awarding Night Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026 yang mengusung tema "Bersatu, Bergerak, Berdampak". Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (23/10/2026) malam.

"Kemendagri berkomitmen untuk mendukung penguatan Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan generasi muda, dan kekuatan penggerak pembangunan khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Kita menginginkan Karang Taruna ini mampu mengembangkan potensi pemuda menjadi mitra pemerintah dalam penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat," katanya.

Wiyagus menjelaskan, peran Karang Taruna memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menambahkan, pemberdayaan Karang Taruna berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) perlu mengakomodasi program kepemudaan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

"Artinya, masing-masing pemerintah daerah dari mulai provinsi dan kabupaten/kota wajib hukumnya untuk memasukkan program kepemudaan ini dalam rencana penyusunan, rencana RKPD, kemudian juga Renstra OPD, kemudian juga dalam RPJMD, tadi paling atas sebetulnya, dan APBD," tambahnya. ● (Egi) ● (Agus)

Menperin Tegaskan Gas Bumi Diutamakan untuk Industri Dalam Negeri

JAKARTA |
Harian Merdeka

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan dan kesiapan mengawal kepastian pasokan gas bumi yang diprioritaskan bagi kebutuhan industri nasional.

Dukungan tersebut sejalan dengan gagasan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia untuk memprioritaskan pemanfaatan gas bumi domestik, serta arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

“Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas



bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sarmuji menjelaskan, gas bumi memiliki peran strategis bagi industri nasional, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku produk-

si. Industri pupuk dan petrokimia memanfaatkan gas sebagai bahan baku utama, sedangkan industri keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan energi yang stabil dengan harga kompetitif.

Oleh karena itu, kepastian pasokan gas menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan operasional pabrik sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Data Kementerian

Perindustrian (Kemenperin) mencatat, realisasi pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat berada di kisaran 65,69 persen pada 2025.

“Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja,” ujarnya.

Menurut Sarmuji, pengutamaan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik juga sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kebijakan tersebut mengarahkan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap dan peningkatan alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk mendukung kegiatan industri. ● (Egi)

Warga Desa Kopo Serang Keluhkan Sertifikat PTSL Tak Kunjung Terbit, BPN Akan Cek

SERANG |
Harian Merdeka

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2024 di Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten, hingga kini masih berjalan di tempat. Ratusan berkas permohonan sertifikasi tanah milik warga yang ditangani oleh Tim 6 Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Serang tertung-katung tanpa kejelasan.

Berdasarkan data dan bukti dokumen permohonan yuridis di lapangan, diperkirakan ada lebih dari 120 berkas pendaftaran warga, salah satunya di wilayah Kampung Pasepatan, Desa Kopo yang belum ram-



pung sejak medio 2024.

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 70 pemohon saat ini masih menunggu kepastian fisik Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan. Sementara itu, sedikitnya 50 pengajuan lainnya bahkan belum tersentuh proses pengukuran bidang tanah sama sekali oleh petugas.

Padahal, pada map folder resmi berkas permohonan pendaftaran sertifikat tanah PTSL T.A. 2024 yang diterbit-

kan Kantah BPN Kabupaten Serang, proses tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Namun hingga kini, lembar kolom pengesahan, pengumuman, hingga nomor seri sertifikat pada dokumen warga masih terpantau kosong tanpa kepastian timeline penyelesaian.

Proses Pemberkasan Berlarut-larut

Keluhan mengenai lambannya proses sertifikasi ini disampaikan oleh salah satu pemohon asal Desa Kopo, Agus (50). Ia menuturkan bahwa ia beserta warga setempat telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan menyerahkan berkas ke kantor desa sejak

pertengahan 2024.

“Kami melakukan pemberkasan ke kantor Desa Kopo bulan Agustus 2024, lalu tanggal 18 Februari 2025 kami menandatangani formulir pendaftaran dan Warkah. Bukti fisik berkas permohonan PTSL T.A. 2024 juga sudah lengkap dipegang, tetapi hingga saat ini belum ada progres atau kejelasan lagi dari pihak BPN” ungkap Agus saat diwawancarai, Sabtu (24/10/2026).

Agus menambahkan, ketidakpastian ini menimbulkan keresahan dan kekecewaan di tengah warga yang sangat membutuhkan kepastian hukum atas tanah pemukiman maupun lahan pertanian mereka. ● (Egi)

Jaringan Curanmor Lintas Provinsi Ditangkap, Polda Banten Minta Warga Cek Kendaraan



SERANG |
Harian Merdeka

Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil mengungkap jaringan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penipuan, dan penggelapan yang beroperasi di wilayah Banten.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Banten, AKBP Muhammad Fauzan Syahrir, mengatakan pengungkapan berasal dari tiga Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni Serang, Tangerang, dan Cilegon, dengan mengamankan sebanyak 7 orang tersangka.

“Untuk rangkaian para pelaku ini, ini kelompok terorganisir, jaringan yang terlibat dari beberapa provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan Lampung,” katanya saat konferensi pers di halaman Mapolda Banten, Jumat (23/10/2026).

Ia menjelaskan, ada tiga modus operandi utama yang dijalankan oleh para pelaku. Pertama, penipuan dengan modus aplikasi kencan, di mana pelaku membujuk dan merayu korban untuk bertemu melalui aplikasi kencan se-

belum akhirnya membawa lari sepeda motor milik korban.

Kedua, pencurian mobil (R4) yang merupakan bagian dari pengembangan kasus sebelumnya yang telah mengungkap 11 kendaraan. Dari jaringan ini, polisi kembali menyita 4 unit mobil lossbak.

“Kemudian modus R2 lainnya menggunakan kunci astag. Pelaku menyasar rumah dengan membobol rumah, area parkir, hingga kawasan perkantoran,” ungkapnya.

Dari keseluruhan pengungkapan ini, petugas mengamankan sedikitnya 24 unit kendaraan roda dua (R2) dan 3 unit kendaraan roda empat (R4).

Fauzan menyebutkan, proses penangkapan dilakukan melalui serangkaian penyelidikan dan pengejaran intensif. Polisi sempat mengejar pelaku hingga ke Lampung, meski kendaraan hasil curian sempat dilempar dan ditemukan di wilayah Karawang, Jawa Barat.

“Dari 7 tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya diketahui merupakan residivis, khususnya pelaku spesialis pencurian kendaraan roda empat,”

paparnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka, kendaraan hasil curian dijual dengan sistem pemesanan dan harga bervariasi. Untuk kendaraan roda dua dipasarkan berkisar antara Rp3 juta hingga Rp7 juta, sedangkan kendaraan roda empat dijual mulai dari Rp15 juta hingga Rp30 juta.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan wujud nyata kerja sama antara polisi dan masyarakat.

Kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk datang melakukan pencocokan dan validasi dokumen resmi. Apabila surat-surat kendaraan dinyatakan sesuai dengan fisik kendaraan yang diamankan, proses pengembalian akan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya.

“Untuk masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan silahkan datang ke Polda Banten, dengan membawa surat-surat kendaraan untuk memastikan kepemilikan kendaraan,” pungkasnya. (Egi)



Polda Kaltara Limpahkan 2 Tersangka Kredit Fiktif Rp208 M BPD Kaltimlara

KALTRA | **Harian Merdeka**

Penyidikan dugaan kredit fiktif di BPD Kaltimlara memasuki babak akhir. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara menyerahkan 2 (dua) tersangka dari pihak debitur yaitu BS dan ADM, beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Pelimpahan ini melengkapi dan menuntaskan proses penyidikan terhadap enam tersangka dari pihak kreditur (BPD Kaltimlara) dan debitur (PT IDK Grup).

Kedua tersangka merupakan pihak debitur dari PT IDK Grup yang diduga terlibat dalam perkara penyimpangan pengajuan hingga pencairan fasilitas kredit konstruksi. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan oleh Tim Penyidik Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltara kepada JPU Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara di Lapas Kelas IIA Samarinda.

PS. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltara, Kompol Marhadiansyah Tofiqs Setiaji, mewakili Dirreskrimsus Polda Kaltara Kombes Pol. Dadan Wahyudi, menegaskan bahwa penyerahan dua tersangka tersebut melengkapi rangkaian penyidikan perkara yang bergulir sejak 2025.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ini dilaksanakan oleh Tim Penyidik Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltara kepada JPU Bidang Pidsus Kejati Kaltara di Lapas Kelas IIA Samarinda terhadap dua orang tersangka, yaitu BS dan ADM selaku debitur dari PT IDK Grup,” ujar Marhadiansyah, Rabu (22/10/2026).

Ia menjelaskan, dua tersangka dari pihak debitur tersebut melengkapi empat tersangka dari internal BPD Kaltimlara (Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang) yang sebelumnya telah lebih dahulu dilimpahkan kepada jaksa.

Dengan demikian, penyidikan terhadap seluruh tersangka dalam perkara ini telah dituntaskan oleh penyidik kepolisian.

“Pelimpahan ini melengkapi dan menyelesaikan proses penyidikan sebelumnya yang sudah lebih dahulu masuk Tahap II terhadap empat orang tersangka dari pihak kreditur BPD Kaltimlara,” tegasnya. ● (Egi)

Kantah Kota Tangerang Perkuat Kemitraan dengan Media

TANGERANG |
Harian Merdeka

Kepala Kantor Pertanahan (BPN/ATR) (Kakantah) Kota Tangerang, Tardi, memperkuat kemitraan dengan insan pers melalui silaturahmi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Tangerang Raya, Kamis (22/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan pertanahan, sekaligus memperkuat komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Tardi mengatakan, media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi mengenai prosedur, program, dan inovasi pelayanan pertanahan secara luas dan mudah dipahami.

Sejumlah inovasi yang



dikembangkan meliputi Kantah Virtual, Virtual Office, Cipta Layanan Berkebutuhan Khusus (CLBK), optimalisasi gerai pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah.

“Kami ingin masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan berkonsultasi, sekaligus mengurangi kendala jarak,

waktu, dan biaya dalam mengakses layanan pertanahan,” ujar Tardi.

Selain digitalisasi, Kantah Kota Tangerang juga mengembangkan pelayanan inklusif bagi masyarakat berkebutuhan khusus serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Pada 2026, Kantah Kota

Tangerang memperoleh Radar Banten Awards kategori Layanan Sektor Publik atas pengembangan inovasi pelayanan digital melalui Kantah Virtual. Kantah juga mencatat hasil sangat baik pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Triwulan II 2026.

Kantah Kota Tangerang turut menyerahkan 18 sertifikat tanah Barang Milik Negara (BMN) terkait proyek jalan tol dengan luas total 129.667 meter persegi dan nilai aset tercatat Rp729,53 miliar.

Tardi berharap kemitraan dengan media terus terjalin untuk meningkatkan edukasi publik dan kualitas pelayanan pertanahan yang transparan, inklusif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

● (dam/hmi)

KASUS KORUPSI

Besarnya dana yang dikelola negara itu memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi penyaluran, penerima manfaat, serta efektivitas pengawasannya.

Desakan tersebut mengemuka di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik perkebunan, serta keberadaan jutaan hektare kebun sawit di dalam kawasan hutan. Rieke menilai pengelolaan dana sawit perlu diperiksa secara menyeluruh agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga benar-benar dirasakan petani swadaya dan mendukung pemulihan lingkungan.

Dalam pernyataan yang dikutip pada Kamis (22/10/2026), Rieke menyoroti alokasi sekitar Rp146 triliun atau 83 persen dari total dana untuk program biodiesel. Alokasi tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan ketepatan penyaluran dan distribusi manfaatnya. Selain itu, subsidi minyak goreng curah sebesar Rp7,28 triliun juga menjadi bagian yang perlu diperiksa agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.

Besarnya alokasi tersebut membuat penyidikan dugaan penyimpangan dana BPDPKS menjadi penting untuk mengurai aliran uang, mengidentifikasi pihak yang menerima manfaat,

dan memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran maupun pungutan yang dikelola untuk kepentingan sektor sawit.

Wilmar, Musim Mas, hingga RGE Masuk dalam Sorotan

Rieke turut memaparkan sejumlah grup usaha sawit yang disebut menerima dana dari badan pengelola dana perkebunan selama periode 2015–2023. Wilmar Group disebut menerima sekitar Rp56,6 triliun hingga Rp64,3 triliun, dengan sekitar Rp52,1 triliun dikaitkan dengan program biodiesel.

Musim Mas Group disebut menerima sekitar Rp26,5 triliun. Sementara itu, Royal Golden Eagle (RGE) disebut menerima dana sekitar Rp21,3 triliun hingga Rp25,4 triliun. Nama Kuala Lumpur Kepong dan Genting Plantation juga disinggung dalam pembahasan mengenai penerimaan dana serta persoalan lingkungan, termasuk konsesi di wilayah gambut yang rawan kebakaran.

Angka-angka tersebut menjadi dasar bagi perlunya pemeriksaan yang transparan terhadap mekanisme penyaluran dana, dasar pemberian insentif, serta kepatuhan penerima terhadap ketentuan yang berlaku.

Namun, angka penerimaan dana dan dugaan keterkaitan perusahaan dengan titik

panas kebakaran tetap harus diverifikasi melalui dokumen resmi dan pemeriksaan aparat penegak hukum. Penerimaan subsidi maupun kepemilikan konsesi di wilayah rawan kebakaran tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan perusahaan dalam tindak pidana.

Data yang dirujuk Rieke disebut berasal dari Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi (KOSMAK) dan WALHI per Oktober 2026. Data tersebut mengidentifikasi 25 hingga 52 korporasi yang disebut terafiliasi dengan modal Singapura dan Malaysia. Rincian angka, periode penerimaan, dan hubungan masing-masing perusahaan dengan dugaan persoalan lingkungan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Tiga Tahun Penyidikan, Kejagung Dituntut Membuka Perkembangan Perkara

Perkara dugaan korupsi dana BPDPKS disebut telah memasuki tahap penyidikan sejak 7 September 2023. Sepanjang 2023–2026, lebih dari 25 saksi, ahli, dan pihak dari kalangan korporasi biodiesel disebut telah diperiksa.

Lamanya proses penyidikan membuat perkembangan perkara dan hasil pemeriksaan menjadi perhatian. Kejagung perlu memberikan penjelasan mengenai progres penanganan kasus,

konstruksi dugaan penyimpangan, serta tindak lanjut atas keterangan dan dokumen yang telah dikumpulkan penyidik.

Penanganan perkara ini juga perlu menjawab pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penyaluran dana berlangsung, serta apakah ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Tanpa penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penyidikan, besarnya nilai dana yang dikelola dan luasnya program yang dibiayai berisiko terus memunculkan pertanyaan publik mengenai akuntabilitas pengelolaan dana sawit.

Nama Sinarmas Agro Muncul dalam Dakwaan Febrie Adriansyah

Sorotan terhadap dana sawit turut bersinggungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 7 Oktober 2026, PT Sinarmas Agro disebut melakukan delapan kali penerimaan uang dengan total Rp4,2 miliar melalui rekening DR. Law Firm. Penerimaan tersebut dikaitkan dalam dakwaan dengan penanganan perkara korupsi dana sawit periode 2015–2022. ● (Egi)



Cinta Laura Wakili Indonesia di Victoria's Secret Fashion Show 2026

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Aktris Indonesia Cinta Laura mendapat kehormatan menghadiri Victoria's Secret Fashion Show 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Cinta menjadi salah satu tamu spesial yang diundang secara khusus dalam ajang fesyen bergengsi dunia tersebut. Menariknya, Cinta menjadi salah satu dari dua perwakilan Asia yang mendapat undangan khusus untuk menghadiri acara tersebut. Satu perwakilan lainnya adalah Catriona Gray, Miss Universe 2018 asal Filipina.

Cinta mengungkapkan, kehadirannya dalam perhelatan internasional itu menjadi pengalaman istimewa sekaligus kesempatan membawa nama Indonesia ke panggung dunia.

"Jadi ini salah satu acara fashion terbesar dunia ya, dan tahun ini yang diterbangkan dari Asia (perwakilan) ada dua orang. Aku dari Indonesia dan Catriona Gray dari Filipina," ungkap Cinta Laura saat ditemui di Studio Brownis Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026). ● (hmi)

MARC MARQUEZ REBUT POLE POSITION MOTOGP AUSTRALIA 2026

TURIN |
Harian Merdeka

Phillip Island | **Harian Merdeka** – Marc Marquez tampil dominan pada sesi kualifikasi MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (24/10) pagi WIB. Pebalap Ducati itu merebut pole position meski harus menghadapi kondisi trek basah.

Marc menunjukkan kecepatannya pada sesi kualifikasi kedua (Q2). Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 34,203 detik untuk mengamankan posisi start terdepan. Catatan tersebut tak mampu dikejar para pesaingnya hingga sesi berakhir.

Persaingan berlangsung ketat sejak awal Q2. Johann Zarco sempat memimpin dengan catatan waktu 1 menit 36,136 detik. Namun, Marc berhasil mengambil alih posisi teratas setelah membukukan waktu 1 menit 36,049 detik.

Zarco kembali merebut posisi pertama dengan torehan 1 menit 35,706 detik. Akan tetapi, Marc menjawab tantangan tersebut dengan memperbaiki waktunya secara signifikan pada penghujung sesi sekaligus memastikan pole position.

Adik Marc, Alex Marquez, mengamankan posisi

kedua dengan selisih 1,494 detik dari sang kakak. Sementara itu, Zarco harus puas menempati urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 35,706 detik.

Pimpinan klasemen Jorge Martin menempati posisi keempat setelah mencatatkan waktu 1 menit 35,780 detik. Pebalap tuan rumah Jack Miller berada di urutan kelima dengan waktu 1 menit 35,984 detik.

Raul Fernandez melengkapi enam besar. Ia terpaut 0,166 detik dari Miller dalam persaingan memperebutkan posisi start terbaik.

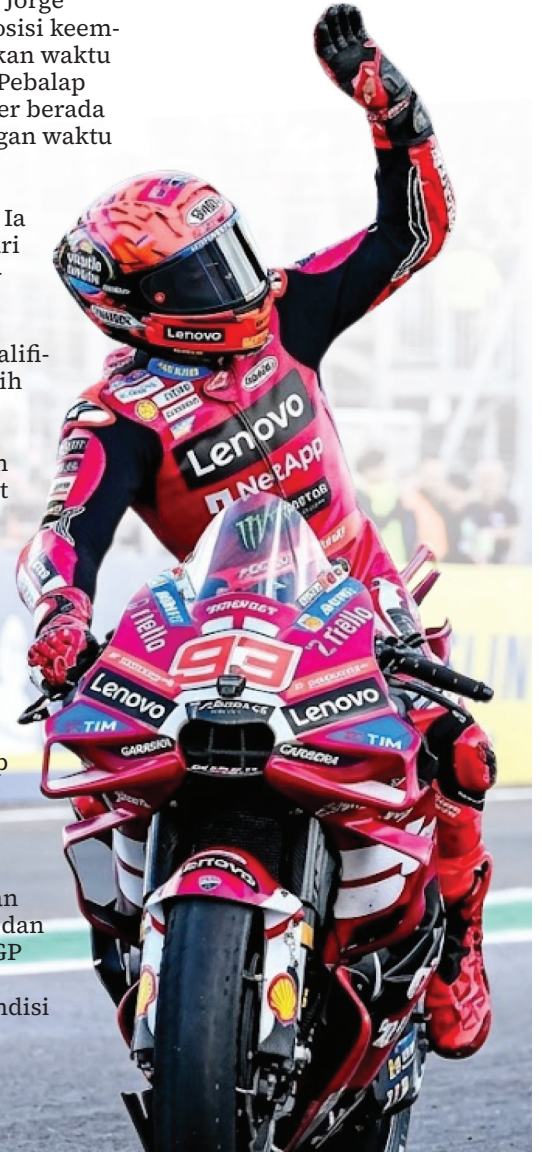
Sebelum Q2, sesi kualifikasi pertama (Q1) lebih dahulu digelar. Jack Miller menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 35,461 detik, hanya unggul 0,001 detik atas Zarco yang mencatatkan waktu 1 menit 35,462 detik.

Keduanya berhak melaju ke Q2 untuk bersaing memperebutkan pole position bersama para pebalap yang telah lolos langsung ke sesi tersebut.

Hasil kualifikasi ini menempatkan Marc di posisi start terdepan untuk balapan sprint dan balapan utama MotoGP Australia. Performa apiknya di tengah kondisi

trek basah menjadi modal penting bagi pebalap Spanyol tersebut untuk memburu hasil maksimal di Phillip Island.

● (hmi)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**